

**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013  
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI**

**Kementerian/Lembaga : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi**  
**Tahun Anggaran : 2013**

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Program	Anggaran
1.	Terwujudnya kebijakan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi yang sesuai dengan kebutuhan	1	Jumlah kebijakan terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1. UU ASN (Bahas DPR) dan Peraturan Pelaksanaannya 2. UU AdPem (Bahas DPR) dan Peraturan pelaksanaannya 3. RUU Sistem Pengawasan Internal Pemerintah 4. RUU Akuntabilitas, RUU Tata Hubungan Pemerintah dan 1 NA RUU Organisasi/Kelembagaan Pemerintah 5. 15 RPP 6. 2 Rperpres 7. 40 Per.MenPANRB	Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Rp.10.419.754.000,-
2.	Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien	2	Jumlah instansi pemerintah/K/L yang telah sesuai jenis dan sifat organisasi, fungsi, analisis dan beban kerja, serta tidak <i>overlapping</i>	16 Kementerian, 10 LPNK, 5 LNS	Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Deputi Bidang Kelembagaan	Rp. 8.215.727.000,-
		3	Jumlah K/L yang telah melakukan pengalihan jabatan struktural eselon III dan IV menjadi jabatan fungsional	8 K/L		
		4	Jumlah instansi pemerintah (K/L dan Pemda) yang ketatalaksanaannya baik	36 K/L terutama sektor terkait daya saing, 20 Provinsi, 50 Kab/Kota	Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Deputi Bidang Tata Laksana	Rp. 9.160.158.000,-

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Program	Anggaran
3.	Terwujudnya SDM Aparatur yang kompeten dan kompetitif	5	Persentase instansi pemerintah yang telah menerapkan sistem rekrutmen terbuka	100%	Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Deputi Bidang SDM Aparatur	Rp.12.957.179.000,-
		6	Persentase instansi pemerintah yang bebas dari penyimpangan material pada tes kompetensi dasar proses rekrutmen CPNS	100%		
		7	Persentase instansi pemerintah yang tes kompetensi bidangnya dalam pengadaan CPNS sesuai dengan peraturan	100%		
		8	Persentase instansi pemerintah yang mendapatkan alokasi formasi CPNS dari pelamar umum dan telah menerapkan kebijakan pengadaan dengan sistem <i>computer assisted test</i> (CAT) untuk seleksi CPNS	100% K/L dan 100% Prov.		
		9	Persentase PNS yang telah mengikuti diklat lebih dari 5% jam kerjanya	10%		
		10	Jumlah jabatan fungsional tertentu baru yang ditetapkan	20 Jabatan fungsional		
		11	Persentase jabatan fungsional yang memiliki standar kompetensi jabatan	25 % dari 119 Jabatan Fungsional		
		12	Jumlah instansi pemerintah yang telah menerapkan kebijakan promosi terbuka dan berbasis kompetensi	20 K/L, 10 prov, 20 Kab, dan 20 kota		
		13	Persentase instansi pemerintah yang memiliki standar kinerja individu	36 K/L, 33 Prov, 33 kab, dan 33 kota		

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Program	Anggaran		
4.	Terwujudnya pemerintahan yang terbuka dan melayani	14	Skor <i>Ease Doing Business</i>	95	Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Deputi Bidang Pelayanan Publik	Rp. 9.719.680.000,-		
		15	Indeks Persepsi Korupsi (IPK)	4.00				
		16	Skor IKM rata-rata unit pelayanan secara nasional	75				
		17	Persentase pemda yang menerapkan OSS (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	100% Provinsi, 100% Kab. dan 100% Kota				
		18	Persentase unit pelayanan publik yang berkategori baik atau lebih (kategori B keatas) sesuai penilaian	20%				
		19	Persentase unit pelayanan yang telah melakukan inovasi pelayanan publik ( <i>One agency, one innovation</i> )	Seluruh K/L dan IPD				
		20	Persentase instansi pemerintah yang telah memiliki unit penanganan pengaduan	60% K/L, 40% Provinsi, 20% Kab/Kota				
		21	Persentase instansi pemerintah yang menerapkan kebijakan <i>no wrong door</i>	10%				
		22	Persentase instansi pemerintah yang menerapkan <i>National Public Complaint Handling System</i> (NPCHS)	5%				
		24	Persentase instansi pemerintah yang menerapkan TIK dalam manajemen pelayanannya	5%				
		25	Tingkat efektivitas pelaksanaan RB	90%			Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Deputi Bidang Program dan Reformasi Birokrasi	Rp.42.450.805.000,-
		26	Persentase K/L/Pemda yang memiliki nilai PMPRB baik	30%				
		27	Tingkat dukungan masyarakat terhadap gerakan RB	Baik				

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Program	Anggaran
5.	Mewujudkan aparatur yang bersih, bebas KKN, dan akuntabel	28	Skor Integritas Nasional	7,0	Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur	Rp.8.246.655.000,-
		29	Persentase instansi pemerintah yang memperoleh opini WTP	100% K/L, 50% IPD		
		30	Persentase unit kerja Instansi Pemerintah yang memperoleh predikat WBK/WBBM	30% K/L 10% IPD		
		31	Persentase penurunan pelanggaran disiplin dan etika PNS	10%	Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Deputi Bidang SDM Aparatur	Rp. 2.240.700.000,-
		32	Persentase penurunan indikasi kasus KKN yang melibatkan PNS	20%		
		33	Persentase instansi pemerintah yang akuntabilitasnya baik	60%	Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur	Rp. 4.420.915.000,-

**Jumlah Anggaran Tahun 2013**

**: Rp. 201.285.843.000,-**

Jakarta, 21 Februari 2013

**Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi,**

**Azwar Abubakar**